

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu

Sistem informasi akuntansi dana zakat pada peneliti terdahulu menjadi referensi maupun pembeda dengan penelitian ini. Adapun beberapa peneliti yang akan di bahas dibawah ini;

Nugraha *et al* (2014), melakukan penelitian dengan judul “Desain Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Masjid”. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan metode deskriptif pada Masjid Agung Jami' yang terletak di Jl. Merdeka Barat No. 3 Malang, Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, beberapa transaksi terjadi perangkapan fungsi antara yang melakukan penyimpanan dan penerimaan kas serta antara yang menyimpan dan mengeluarkan kas. Sehingga keakuratan pencatatan masih diragukan karena tidak lengkapnya bukti transaksi. Selain Itu, Pelaporan keuangan Masjid Agung Jami' menggunakan basis kas yang hanya menghasilkan output berupa Laporan Arus Kas. Kemudian peneliti melakukan desain dengan tambahan beberapa dokumen untuk memenuhi kecukupan bukti yang mendukung.

Bashori (2015), menganalisis sistem informasi akuntansi zakat, infak, sedekah (ZIS) Pada BAZ Di Jawa Timur. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa BAZ di Jawa Timur tidak menggunakan sistem informasi akuntansi secara baik dan benar. Adapun kelemahan BAZ di Jawa Timur tidak menggunakan penomoran permanen pada kwitansi dengan alasan tidak

digunakannya program pemrosesan transaksi yang dapat menciptakan sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien.

Wuryaningsih dan Hidayah (2016), melakukan penelitian dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Pada Pusat Kajian Zakat Dan Wakaf (LAZ)” dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan, bahwa perancangan sistem informasi akuntansi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Kota Malang dapat disimpulkan bahwasanya sudah memiliki sistem informasi akuntansi yang baik, namun masih belum ada dokumentasi. Maka penulis memberikan rekomendasi racangan sistem yang baru dan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di LAZ seperti membuat form Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK).

Nurromlah *et al* (2017), melakukan penelitian dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Penerimaan Dan Penyaluran Donasi Pada DPU-DT Kota Sukabumi” menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian menyatakan, bahwa sudah ada sistem informasi akuntansi yang baik pada DPU-DT namun masih memiliki kekurangan seperti adanya perangkapan tugas pada fungsi admin yang melakukan kegiatan akuntansi mulai dari pencatatan transaksi sampai pembuatan laporan yang seharusnya dilakukan oleh fungsi akuntansi.

Rohmah (2018), menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi zakat infaq dan shodaqah berbasis komputerisasi pada yayasan nurul hayat cabang Malang dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari

penelitian menyatakan, bahwa yayasan nurul hayat cabang malang sudah menerapkan sistem informasi akuntansi dengan baik namun masih memiliki kekurangan pada penerimaan kas melalui transfer bank yaitu pada penggunaan rekening yang sama atau tidak dibedakan antara rekening untuk dana zakat, infaq dan shodaqah. permasalahan yang terjadi apabila ada donatur yang mentransfer dana zis tanpa konfirmasi hal ini akan menyulitkan amil dalam penyalurannya dananya karna penyaluran dana zakat, infaq dana shodaqah berbeda.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu banyak di temukan beberapa masalah seperti yang telah dilakukan peneliti Wuryaningsih dan Hidayah (2016) menyatakan bahwa lembaga zakat sudah menerapkan sistem informasi akuntansi dengan baik namun memiliki kendala tidak adanya dokumentasi seperti surat penerimaan dan permintaan pengeluaran kas yang secara prinsip umum pengendalian internal disebut dengan Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar (BKK), Surat permintaan pengisian dana kas kecil yang disebut dengan Surat Permintaan Kas Kecil (SPKK). Peneliti Bashori (2015) menyatakan bahwa lembaga zakat belum menerapkan sistem informasi akuntansi dengan baik yang disebabkan tidak adanya nomor permanen pada dokumen transaksi. Pada peneliti Nugraha *et al* (2014) menyatakan lembaga zakat belum menerapkan sistem informasi akuntansi disebabkan perangkapan fungsi antara yang melakukan penyimpanan dan penerimaan kas serta antara yang menyimpan dan mengeluarkan kas. Adapun kemiripan masalah mengenai pembagian tugas yang terjadi pada peneliti Nurromlah *et al* (2017) menyatakan

bahwa sudah ada sistem informasi akuntansi yang baik pada DPU-DT namun masih memiliki kekurangan disebabkan adanya perangkapan tugas pada fungsi admin yang melakukan kegiatan akuntansi dari pencatatan transaksi sampai pembuatan laporan yang seharusnya dilakukan oleh fungsi akuntansi. Sedangkan pada peneliti Rohmah (2018) menyatakan bahwa yayasan nurul hayat cabang malang sudah menerapkan sistem informasi akuntansi dengan baik namun masih ada kekurangan pada penerimaan kas melalui transfer bank menggunakan rekening yang sama atau tidak dibedakan antara rekening untuk dana zakat, infaq dan shodaqah. Adapun permasalahan yang terjadi apabila donatur mentransfer dana zis tanpa konfirmasi kepada pihak amil. Hal ini menyulitkan amil dalam penyalurannya dananya karna penyaluran dana zakat, infaq dana shodaqah berbeda.

B. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Bodnar & Hopwood (2010), Informasi adalah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. sedangkan pengertian sistem informasi akuntansi, merupakan kumpulan sumber daya seperti: manusia dan peralatan, yang diatur sedemikian rupa untuk mengubah data akuntansi menjadi informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh para penggunanya.

Menurut Mulyadi (2016), sistem informasi akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian

rupa sebagai upaya untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan oleh tim manajemen dalam upaya pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan.

2. Tujuan Dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Mulyadi (2016) menyatakan Sistem Informasi Akuntansi memiliki empat tujuan, yaitu :

- a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha.
- b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya.
- c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
- d. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Menurut Krismiadi (2015), dalam bukunya yang berjudul “Sistem Informasi Akuntansi”. Fungsi dari sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, memproses data tentang kegiatan organisasi secara efisien dan efektif.

- b. Menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.
- c. Melakukan pengawasan yang memadai untuk menjamin bahwa data transaksi bisnis telah dicatat dan diproses secara akurat serta untuk melindungi data tersebut dan aktiva lainnya.

3. Komponen-Komponn Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2004) Sistem informasi akuntansi terdiri dari lima komponen, yaitu;

- a. Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi.
- b. Prosedur-prosedur, baik manual maupun terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas organisasi.
- c. Data tentang proses-proses bisnis organisasi.
- d. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi.
- e. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung (peripheral device), dan peralatan komunikasi jaringan

4. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Organisasi pengelola zakat (OPZ) merupakan sebuah institusi yang memiliki tugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, di Indonesia terdapat dua jenis Organisasi Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat

(LAZ). LAZ dibentuk oleh masyarakat dalam rangka membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dengan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk Menteri (Zakat, 2013)¹.

5. Zakat, Infaq dan Sedekah

Menurut Nawawi (2009), Zakat ditinjau dari segi bahasa (lughatan), mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan, pertumbuhan, dan perkembangan, kesucian dan keberesan. Sedangkan arti zakat secara istilah ialah bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Sedangkan infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain. Adapun istilah Shodaqah diartikan segala bentuk pemberian harta dengan niat karna Allah SWT. Shodaqah tidak dibatasi dengan ketentuan – ketentuan khusus. Selain dalam bentuk harta (maal), shodaqah dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran dan bahkan sekedar senyuman. Rasulullah SAW menegaskan dalam haditsnya bahwa “senyummu untuk saudaramu adalah bagian dari shodaqah” (Zakat, 2013)².

¹ <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734.pdf>

² <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734.pdf>

6. Penerimaan Dana Zakat

Pengakuan dan Pengukuran penerimaan dana zakat sebagai berikut:

- a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:
 - 1) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
 - 2) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut
- b. Penerimaan dana zakat langsung dibagi/klasifikasi menjadi dana amil dan dana zakat sesuai dengan kebijakan (Pengungkapan).
- c. Apabila pemberi zakat (Muzaki) menentukan orang atau entitas (mustahiq) yang menerima maka seluruh penerimaan zakat diakui sebagai dana zakat dan disalurkan sesuai dengan permintaan muzaki. (Indonesia, 2008³).

7. Pengeluaran Dana Zakat

Pengakuan dan Pengukuran pengeluaran/penyaluran dana zakat sebagai berikut:

- a. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
 - 1) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
 - 2) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

- b. Penyaluran zakat kepada mustahiq didasarkan pada kebijakan program/kegiatan. (Indonesia, 2008).

8. Penerimaan Dana Infaq/shodaqah

Pengakuan dan Pengukuran penerimaan dana Infaq/shodaqah sebagai berikut:

- a. Infak/sedekah diakui sebagai;
 - 1) Dana Infak/sedekah terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah
 - 2) Dana Infak/sedekah tidak terikat
- b. Penerimaan Infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima sebagai penambah dana infak/sedekah;
 - 1) jika dalam bentuk kas diakui sebesar kas yang diterima
 - 2) jika dalam bentuk nonkas diakui senilai harga pasar
- c. Penerimaan dana infak/sedekah langsung dibagi menjadi dana amil dan dana infak/sedekah sesuai dengan kebijakan (Pengungkapan)
- d. Apabila pemberi infak/sedekah menentukan orang atau entitas yang menerima (terikat) maka seluruh penerimaan diakui sebagai dana infak/sedekah dan disalurkan sesuai dengan permintaan pemberi.
- e. Apabila pemberi infak/sedekah menentukan program/kegiatan yang menerima (terikat) maka seluruh penerimaan diakui sebagai dana

infak/sedekah dan disalurkan sesuai dengan program/kegiatan tersebut (Indonesia, 2008⁴).

9. Penyaluran Dana Infaq/Shodaqah

Pengakuan dan Pengukuran penyaluran dana infaq/shodaqah sebagai berikut:

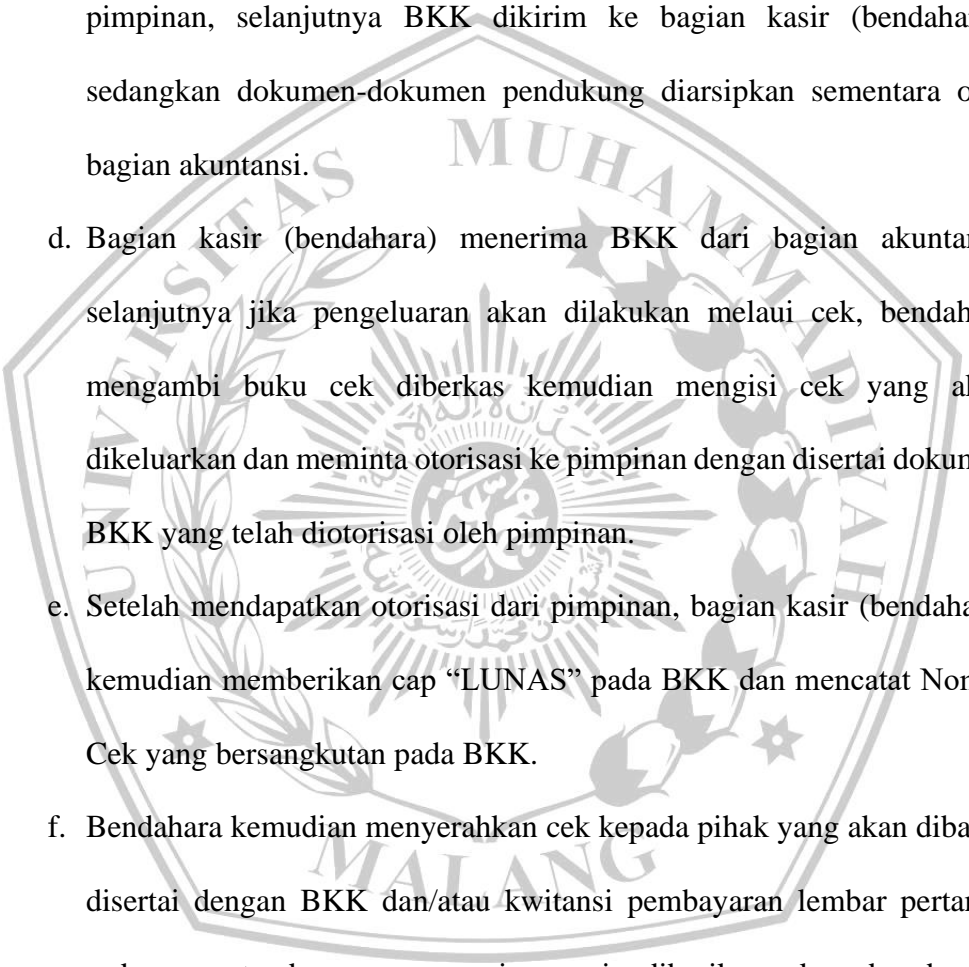
- a. Infaq/shodaqah disalurkan diakui sebagai pengurang dana sebesar:
 - 1) jumlah kas yang diserahkan
 - 2) jumlah aset nonkas yang tercatat
- b. Penyaluran infak/sedekah didasarkan pada kebijakan program/kegiatan
- c. Penyaluran infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah (Indonesia, 2008)

10. Prosedur Penerimaan Kas

Menurut Mahmudi (2009) ada 7 prosedur penerimaan kas pada Organisasi Pengelolaan Zakat, yaitu:

- a. Muzakki, wakif atau pihak ketiga melakukan transfer uang ke rekening bank organisasi pengelolaan zakat.
- b. Bagian kasir (bendahara) secara rutin mengecek saldo rekening bank.
- c. Bagian kasir (bendahara) menerima bukti transfer dari pengirim (jika ada) selanjutnya dikirim ke bagian akuntansi.

- d. Atas penerimaan kas melalui transfer bank tersebut, bagian kasir (bendahara) kemudian mengisi Bukti Kas Masuk (BKM). Bukti Kas Masuk bersama bukti transfer (jika ada) selanjutnya dikirim ke bagian akuntansi.
 - e. Bagian akuntansi menerima Bukti Kas Masuk dan Dokumen pendukung dari bendahara dan memo kredit dari bank yang menunjukkan adanya penerimaan.
 - f. Bagian akuntansi menerima Bukti Kas Masuk dan Dokumen Pendukung yang ada serta memo kredit kemudian mencatat penerimaan tersebut ke dalam jurnal, buku besar, dan buku pembantu yang diperlukan.
 - g. Untuk rekonsiliasi catatan, bagian akuntansi meminta laporan dari bank.
11. Prosedur Pengeluaran Kas
- Menurut Mahmudi (2009) ada 7 prosedur pengeluaran kas pada Organisasi Pengelolaan Zakat, yaitu:
- a. Bagian akuntansi menerima permintaan pembayaran dari pihak luar atau surat pengajuan pencairan dana dari pihak internal organisasi. Permintaan pembayaran dari pihak luar dilengkapi dengan dokumen transaksi yang valid, seperti faktur, surat tagihan, kwitansi dan sebagainya. Yang dikeluarkan pihak internal yang mengajukan pencairan dana juga harus didukung dengan dokumen berupa surat permohonan Pencairan Dana yang sudah disetujui manajer keuangan, dokumen anggaran, dan rencana penggunaan dana.

- 
- b. Bagian akuntansi kemudian menyiapkan Bukti Kas Keluar (BKK) pada saat dilakukan pembayaran. Bukti Kas Keluar dibuat rangkap tiga.
- c. Bagian akuntansi meminta otorisasi BKK ke pimpinan (Manajer keuangan dan/atau Direktur Utama) dengan dilampiri dokumen-dokumen pendukung yang ada. Setelah mendapat otorisasi dari pimpinan, selanjutnya BKK dikirim ke bagian kasir (bendahara), sedangkan dokumen-dokumen pendukung diarsipkan sementara oleh bagian akuntansi.
- d. Bagian kasir (bendahara) menerima BKK dari bagian akuntansi, selanjutnya jika pengeluaran akan dilakukan melalui cek, bendahara mengambil buku cek diberkas kemudian mengisi cek yang akan dikeluarkan dan meminta otorisasi ke pimpinan dengan disertai dokumen BKK yang telah diotorisasi oleh pimpinan.
- e. Setelah mendapatkan otorisasi dari pimpinan, bagian kasir (bendahara) kemudian memberikan cap “LUNAS” pada BKK dan mencatat Nomor Cek yang bersangkutan pada BKK.
- f. Bendahara kemudian menyerahkan cek kepada pihak yang akan dibayar disertai dengan BKK dan/atau kwitansi pembayaran lembar pertama, sedangkan tembusannya masing-masing diberikan kepada bagian akuntansi dan bagian kasir (bendahara) untuk arsip.
- g. Bagian Akuntansi setelah menerima tembusan BKK dan kwitansi pembayaran yang sudah mendapat cap “LUNAS” dan otorisasi secara lengkap kemudian mencatat ke dalam jurnal pengeluaran kas, buku besar

kas, dan buku pembantu register BKK. Selanjutnya BKK dan kwitansi tersebut diarsip sesuai dengan nomor urutnya.

